

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi perusahaan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan. Salah satu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan adalah informasi tentang laba. Informasi tersebut mencerminkan tentang kinerja perusahaan yang menjadi fokus perhatian bagi para pengguna laporan keuangan.

Laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan merupakan laba yang dihasilkan dengan metode akrual (IAI: 2009). Menurut Dechow (1994), laba akrual dianggap sebagai ukuran yang lebih baik dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas operasi karena akrual mempertimbangkan masalah waktu, tidak seperti yang terdapat dalam arus kas dari aktivitas operasional. Standar akuntansi yang terdapat di Indonesia atau yang dikenal dengan istilah Standar Akuntansi Keuangan (SAK), memberikan fleksibilitas bagi manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi yang lebih merepresentasikan keadaan perusahaan sesungguhnya. Fleksibilitas itulah yang terkadang dimanfaatkan oleh pihak manajemen untuk melakukan pengelolaan kebijakan manajemen laba untuk menguntungkan pihak-pihak pengguna laporan keuangan tertentu, yang kemudian menimbulkan asimetri informasi.

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) paragraf ke 9 (Revisi 2009), dinyatakan bahwa pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat.

Pemberlakuan asas *self assessment system* dalam pemungutan pajak di Indonesia, memberikan kepercayaan kepada pihak wajib pajak dalam hal ini adalah wajib pajak badan untuk menentukan sendiri berapa besaran pajak yang harus dibayar. Pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah ditentukan berdasarkan besarnya laba perusahaan untuk kemudian dihitung sesuai dengan tarif pajak badan yang berlaku.

Pemerintah dalam hal ini adalah fiskus menggunakan informasi yang terdapat pada laporan keuangan yaitu laporan laba rugi sebagai penentu besaran pajak badan yang harus dibayar oleh perusahaan. Laba dan rugi yang diterima dan ditanggung perusahaan tentu berpengaruh dalam pembayaran pajak perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak ini didasarkan oleh hasil usaha perusahaan yang berasal dari kegiatan operasi utama maupun kegiatan lainnya, dalam hal ini adalah laba yang dihitung menurut aturan akuntansi yang standar, namun disisi lain fiskus juga mempunyai peraturan sendiri dalam menghitung hasil usaha perusahaan berdasarkan filosofi dasar dari pihak fiskus yaitu bagaimana mendapatkan pemasukan negara yang maksimal.

Keadaan ini menimbulkan dualisme dasar penghitungan pajak yaitu pajak yang dihitung dari laba menurut standar akuntansi yang dianut secara umum (*book-income*) dan pajak yang dihitung dari laba menurut peraturan perpajakan (*taxable income*) dimana diantara kedua laba tersebut memiliki perbedaan atau gap yang biasa disebut dengan istilah *book tax differences/gap*.

Mazur dan Plumpey (2007) dalam Nuryana dan Christine (2009:222), menyatakan bahwa selain dikarenakan perbedaan standar akuntansi, *book tax differences/gap* juga disebabkan oleh tiga komponen antara lain: 1) *nonfilling gap* yaitu perbedaan karena wajib pajak telat lapor atau tidak melaporkan pajak sama sekali, 2) *underreporting gap* yaitu perbedaan karena adanya kesalahan dalam pelaporan pajak yang mengakibatkan naiknya hutang pajak, 3) *underpayment gap* yaitu perbedaan karena terlambat dalam pembayaran pajak.

Pohan (2009:63), mengatakan bahwa perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal (*book tax differences/gap*) ini menyebabkan timbulnya benturan kepentingan antara pihak perusahaan dalam hal ini manajer dan pemilik dan pihak fiskus dipihak lainnya, dimana perusahaan memandang pajak sebagai biaya yang harus diminimalkan, sedangkan pihak fiskus memandang pajak sebagai pemasukan yang harus dimaksimalkan.

Perusahaan yang selalu memperoleh laba yang besar akan menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak yang sesuai, proses pemajakan akan didasarkan kepada informasi akuntansi yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan keuangan, semakin besar laba yang dihasilkan semakin besar pajak yang

dikenakan. Dengan demikian akan timbul konflik kepentingan antara perusahaan dan pemerintah selaku wakil rakyat dalam penarikan pajak perusahaan.

Beda laba akuntansi dengan laba fiskal terjadi dalam setiap pelaporan keuangan di akhir periode pada perusahaan. Selain disebabkan oleh dualisme dasar penghitungan pajak, prinsip akuntansi juga turut mempengaruhi beda laba akuntansi dengan laba fiskal. Salah satu prinsip akuntansi tersebut adalah prinsip konservatisme. Konservatisme merupakan prinsip akuntansi yang akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan utang cenderung tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*). Hal ini diperkuat dengan pendapat (Lara *et al.*;2007) dan (Ahmed *et al.*;2002) dalam Nasih dan Robith (2011:193) yang menyatakan bahwa teori konservatisme, akuntan harus melaporkan nilai terendah dari beberapa nilai yang mungkin untuk aktiva dan pendapatan serta nilai tertinggi untuk kewajiban dan beban.

Usaha meninggikan kewajiban dan beban dilakukan oleh akuntan perusahaan dengan cara memasukkan beban-beban operasional kedalam beban yang sesuai dengan aturan perpajakan. Semakin besar beban perusahaan, maka semakin kecil laba perusahaan yang diperoleh. Dengan laba perusahaan yang kecil, tentunya besaran pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah semakin kecil, dan hal ini akan menguntungkan bagi perusahaan. Menurut Pohan (2009:80) konservatisme

akuntansi suatu perusahaan akan meminimalkan biaya politik dalam hal ini adalah pajak.

Selain konservatisme akuntansi, nilai perusahaan juga mempengaruhi beda laba akuntansi dengan laba fiskal. Nilai perusahaan yang kecil memiliki probabilitas untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Pohan (2008) rasio Tobin Q (sebagai proksi dalam menghitung nilai perusahaan) lebih kecil dari satu berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan manajemen dalam melakukan *tax avoidance*, yang berarti perusahaan yang mempunyai nilai kapitalisasi saham yang kecil (dari komponen rasio Tobin Q) mencerminkan kinerja manajemen yang melakukan tindakan pengaturan laba untuk tujuan minimalisasi pajak.

Beda laba akuntansi dan laba fiskal sering terjadi dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Perbedaan ini dikarenakan adanya dualisme ketentuan penentuan pajak yaitu berdasarkan standar akuntansi dan berdasarkan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan antara laporan keuangan dan fiskal disebabkan dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak. Palepu, Healy, Benard (2000) dalam Yulianti (2004) menyatakan semakin besar perbedaan antara laba yang dilaporkan perusahaan (laba komersil) dengan laba fiskal menunjukkan “bendera merah” (*red flag*) bagi pengguna laporan keuangan. Semakin besar presentase beban pajak tangguhan terhadap total beban pajak perusahaan menunjukkan pemakaian standar akuntansi yang semakin liberal (Hawkin, 1998)

dalam Yulianti (2004). Mills dan Newberry (2001) dalam Yulianti (2004) menyatakan bahwa semakin besar insentif manajemen untuk melakukan manajemen laba akan menyebabkan semakin besarnya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal.

Beda laba akuntansi dan laba fiskal merupakan fenomena yang dimaklumi, dan dapat dimengerti. Untuk menyamakan persepsi tentang penentuan besaran pajak, suatu perusahaan diharuskan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal di akhir tahun. Perbedaan yang terlalu jauh antara laba akuntansi dan laba fiskal dapat dicurigai sebagai bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*). Fenomena seperti ini terjadi pada sejumlah industri di Indonesia, seperti yang terdapat pada harian Antara News tanggal 1 Januari 2007.

“Jakarta (ANTARA News) - Dirjen Pajak Departemen Keuangan, Darmin Nasution, mengungkapkan pembayaran kewajiban pajak oleh sejumlah industri, seperti minyak goreng, dan properti atau real estate, tak sebanding dengan omset usaha bidang itu”.

Fenomena kejanggalan pembayaran pajak ini kerap terjadi pada industri *real estate* dan *properties*. Hingga akhirnya pada bulan September tahun 2008, pihak Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyelidikan terhadap industri tersebut, seperti yang terdapat pada harian Seputar Indonesia tanggal 8 September 2008 dengan reporter Muhammad Ma'ruf.

“JAKARTA (SINDO)- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan memeriksa perusahaan jasa konstruksi dan real estate. Audit tersebut merupakan permintaan Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution untuk mencari kekurangan pajak pada sektor tersebut. Darmin mengatakan, pemeriksaan tersebut terkait pula dengan optimalisasi penerimaan negara yang lazim dilakukan BPKP setiap tahun”.

Alasan penggunaan perusahaan *real estate, properties* dan *building construction* yang terdapat di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian karena perusahaan tersebut melakukan penyeteroran pajak yang tidak sebanding dengan omzet yang didapat oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Nilai Perusahaan terhadap *Book Tax Differences* pada Perusahaan *Real Estate, Properties* dan *Building Construction* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh konservatisme akuntansi secara parsial terhadap *book tax differences*?
- b. Apakah terdapat pengaruh nilai perusahaan secara parsial terhadap *book tax differences*?
- c. Apakah terdapat pengaruh konservatisme akuntansi dan nilai perusahaan secara stimultan terhadap *tax book differences*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi secara parsial terhadap *book tax differences*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh nilai perusahaan secara parsial terhadap *book tax differences*.
- c. Untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi dan nilai perusahaan secara simultan terhadap *tax book differences*.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *book tax differences* perusahaan, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi terjadinya perbedaan pencatatan, sehingga mempermudah dalam proses rekonsiliasi fiskal.

- b. Bagi pihak akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bukti empiris sebagai rekomendasi penelitian tentang *book tax differences* yang dilakukan di Indonesia di masa yang akan datang.

- c. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh manajemen laba, konservatisme akuntansi dan nilai

perusahaan terhadap *tax book differences* dan menguji pengetahuan yang telah didapatkan ketika berada di bangku kuliah untuk dapat diaplikasikan dalam menyusun penelitian dan mengolah data yang ada untuk mencapai hasil yang diharapkan.